JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENGARUH PENGELOLAAN BUMDes "JALUR BERSAMA" TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA PADANG BASAR HILIR KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Nurul Nazwa[1], Ramona Handayani[2], Norhidayah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: nazwan096@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana kontribusi tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 'Jalur Bersama' dalam menentukan tingkat kepuasan warga di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Langkah ilmiah tersebut diambil guna memotret kualitas manajerial internal BUMDes yang pada implementasi di lapangan masih kerap terhambat oleh ketidaksesuaian keahlian pengelola, keterbatasan sarana prasarana operasional, serta minimnya pelibatan masyarakat lokal secara aktif. Berpijak pada metode kuantitatif dengan desain asosiatif, studi ini menghimpun data primer melalui kuesioner, observasi langsung, dan dokumentasi terhadap 84 responden yang dipilih menggunakan formula statistik Slovin dari total populasi sebesar 530 jiwa. Seluruh instrumen data dipastikan valid serta reliabel, didukung pemenuhan uji asumsi klasik yang membuktikan data berdistribusi normal sekaligus berpola linear. Hasil analisis regresi linear sederhana memperlihatkan adanya dampak positif sekaligus signifikan dari pengelolaan BUMDes terhadap kepuasan publik, dibuktikan oleh perolehan nilai t-hitung sebesar 9,226 yang melampaui t-tabel 1,664. Lewat model persamaan matematika Y = 12,274 + 0,404X, diketahui bahwa variabel manajemen ini memberikan kontribusi pengaruh sebesar 50,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel luar. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah desa setempat sangat direkomendasikan untuk mengintensifkan pembinaan berkala, memperkuat keterbukaan informasi, serta merangkul aspirasi warga demi kemajuan unit usaha bersama ini.

Kata Kunci: Tata Kelola BUMDes, Kepuasan Masyarakat, Regresi Linear Sederhana

ABSTRACT

This study was conducted to examine the extent to which the governance of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) 'Jalur Bersama' contributes to determining the level of public satisfaction in Padang Basar Hilir Village, North Amuntai District, North Hulu Sungai Regency. This scientific step was taken to capture the internal managerial quality of BUMDes, which in its implementation in the field is still often hampered by the mismatch of managerial expertise, limited operational infrastructure, and minimal active involvement of the local community. Based on a quantitative method with an associative design, this study collected primary data through questionnaires, direct observation, and documentation from 84 respondents selected using the Slovin statistical formula from a total population of 530 people. All data instruments were confirmed to be valid and reliable, supported by the fulfillment of the classical assumption test which proves the data is normally distributed and has a linear pattern. The results of the simple linear regression analysis showed a positive and significant impact of BUMDes management on public satisfaction, evidenced by the obtained t-value of 9.226 which exceeds the t-table of 1.664. Using the mathematical equation model Y = 12.274 + 0.404X, it was found that this management variable contributed 50.9% of the influence, while the remainder was influenced by external variables. As a remedial measure, the local village government is strongly recommended to intensify regular coaching, strengthen information transparency, and embrace community aspirations for the advancement of this joint venture unit.

Keywords: *Village-Owned Enterprise Governance, Community Satisfaction, Simple Linear Regression*

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

PENDAHULUAN

Indonesia dikaruniai karakteristik geografis yang subur dan kelimpahan sumber daya alam yang membentang luas dari ujung barat di Sabang hingga ujung timur di Merauke. Karakteristik khas dari setiap daerah dan wilayah pedesaan melahirkan diversifikasi potensi komoditas lokal yang esensial, di mana pemanfaatannya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan primer harian sekaligus mendongkrak stabilitas ekonomi domestik keluarga. Dalam tatanan makro, wilayah pedesaan bertindak selaku episentrum perekonomian nasional mengingat pasokan kebutuhan logistik negara sangat bergantung pada produktivitas hasil alam desa yang melimpah, yang secara simultan menggerakkan roda finansial negara (Pradesa & Agustina, 2020). Menghadapi konstelasi persaingan pasar global yang semakin ketat dan kompetitif saat ini, keterlibatan aktif para aktor ekonomi di tingkat akar rumput menjadi faktor penentu dalam mengakselerasi tren pertumbuhan serta kemajuan kawasan pedesaan. Akselerasi pertumbuhan makroekonomi ini hanya dapat diraih apabila disokong oleh struktur perekonomian domestik desa yang tangguh, yang pada gilirannya akan memberikan dampak multiplikasi terhadap eskalasi kesejahteraan masyarakat secara luas (Octaviani, 2022). Oleh sebab itu, agenda pembangunan nasional pada hakikatnya dirancang demi memanifestasikan keadilan sosial dan pemerataan kemakmuran, di mana kawasan rural tidak lagi sekadar diposisikan sebagai objek pasif, melainkan bertransformasi menjadi subjek pembangunan yang memegang kendali atas modal finansial, sosial, serta kelembagaan lokal secara optimal.

Implementasi regulasi yuridis formal melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menginisiasi pergeseran paradigma kepemerintahan dengan memberikan delegasi otoritas yang jauh lebih rigid dan luas kepada pemerintah desa untuk mengarahkan sekaligus mengelola rumah tangganya secara mandiri. Melalui kebijakan desentralisasi ini, entitas desa memiliki otonomi penuh untuk merumuskan formulasi perencanaan strategis serta mengeksekusi program pembangunan yang berbasis pada pemetaan urgensi dan potensi lokalitas. Sebagai wujud konkret dalam menyokong kemandirian finansial di tingkat lokal, instrumen kebijakan publik mengamanatkan pendirian Badan Usaha Milik Desa atau yang dikenal dengan istilah BUMDes. Secara spesifik di tingkat regional, operasionalisasi lembaga ini diperkuat secara hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan instrumen legalitas operasional ini menguraikan secara komprehensif mengenai tata cara pendirian, mekanisme tata kelola administrasi, hingga sistem pengawasan struktural, agar seluruh aktivitas komersial yang dijalankan tetap berjalan lurus dengan koridor regulasi demi pemberdayaan kapasitas ekonomi masyarakat setempat.

Eksistensi BUMDes pada dasarnya diproyeksikan sebagai korporasi sosial-ekonomi tingkat desa yang diinisiasi dan dioperasikan secara kolaboratif oleh pemerintah desa bersama elemen warga demi menstimulasi pendapatan asli desa (PADes), menciptakan lapangan kerja baru, serta meretas rantai kemiskinan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, lembaga usaha ini memikul tanggung jawab ganda yang tidak hanya berfokus pada akumulasi laba finansial murni, melainkan juga menjalankan misi sosiologis dalam memfasilitasi pelayanan publik yang merata. Ditinjau dari sudut pandang administrasi publik, performa manajerial dalam mengelola unit usaha desa ini memegang peranan krusial karena berkorelasi langsung terhadap derajat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat utama pelayanan. Penilaian tingkat kepuasan publik ini menjadi instrumen evaluasi yang sangat valid untuk menakar sejauh mana kapabilitas organisasi sektor publik mampu menyelaraskan kinerja operasionalnya dengan ekspektasi nyata dari para pemangku kepentingan (Kotler & Keller, 2021). Namun, dalam realitas empiris, tata kelola kelembagaan ini kerap kali dihadapkan pada deviasi

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

struktural seperti lemahnya kompetensi manajerial sumber daya manusia, keterbatasan sarana prasarana penunjang operasional, hingga stagnasi inovasi produk yang berujung pada penurunan mutu pelayanan sosial bagi publik.

Gambaran nyata mengenai dinamika operasional ini terekam di Desa Padang Basar Hilir, sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan karakteristik demografi penduduk yang mencakup 530 jiwa, yang terbagi atas komposisi 252 warga laki-laki dan 278 warga perempuan berdasarkan tabulasi data berkala tahun 2025. Hasil observasi awal serta wawancara mendalam bersama Kepala Desa mengindikasikan adanya indikasi suboptimal dalam pengelolaan BUMDes "Jalur Bersama", khususnya pada unit bisnis budidaya ayam petelur yang masih terkendala koordinasi internal akibat minimnya latar belakang keahlian peternakan dan ketiadaan pelatihan teknis bagi para pengelola. Di samping itu, fasilitas penunjang operasional di lapangan dinilai sangat terbatas, yang ditandai dengan penggunaan sistem pengairan kandang yang masih konvensional atau manual, belum tersedianya gudang logistik pakan yang representatif sesuai standar mutu, serta absennya perangkat mekanik pengatur stabilitas temperatur ruangan kandang. Kondisi defisit sarana ini diperparah oleh rendahnya partisipasi aktif dari elemen masyarakat dalam menyumbangkan gagasan konstruktif demi ekspansi usaha. Berangkat dari kompleksitas permasalahan tata kelola tersebut yang berpotensi mendegradasi kepuasan kolektif warga, maka agenda kajian ilmiah ini difokuskan untuk menguji secara empiris mengenai "PENGARUH PENGELOLAAN BUMDes "JALUR BERSAMA" TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI DESA PADANG BASAR HILIR KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA".

Mengkaji urgensi tata laksana kelembagaan, istilah pengelolaan pada esensinya diserap dari konsep manajemen universal yang merepresentasikan serangkaian tindakan mengatur, mengarahkan, mengeksekusi, serta mengendalikan seluruh instrumen organisasi demi mencantumkan capaian target yang definitif. Konstruksi teoritis dari Ibrahim (2018: Manajemen Badan Usaha Milik Desa) mengonseptualisasikan pengelolaan sebagai sebuah siklus integratif yang meliputi formulasi perencanaan, pengorganisasian struktural, pelaksanaan operasional, hingga pengawasan komprehensif atas seluruh portofolio usaha demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi kawasan rural yang kokoh dan berkelanjutan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Terry dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:2) memformulasikan pengelolaan sebagai sebuah mekanisme yang terstruktur secara sistemik demi merampungkan suatu target melalui empat pilar fungsional utama, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling). Sementara itu, Appley dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:3) menekankan dimensi humanistik dengan menyebut bahwa pengelolaan merupakan sebuah seni sekaligus disiplin keilmuan yang memfokuskan kegiatannya pada upaya pencapaian target organisasi melalui transmisi kerja sama dan kontribusi optimal dari orang lain. Melengkapi konstruksi tersebut, Fattah (2019) dalam Mustofa Abi Hamid, dkk (2021:3) menggarisbawahi bahwa pengelolaan adalah proses manajerial yang mengintegrasikan aspek kepemimpinan dan pengendalian seluruh elemen internal agar visi misi organisasi dapat terealisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

Eksplorasi lebih mendalam mengenai kerangka manajerial dipaparkan oleh George R. Terry (2016: Manajemen Prinsip dan Praktik, Bandung: Bumi Aksara) yang mengukuhkan bahwasanya pengelolaan atau manajemen merupakan interaksi proses yang tidak dapat dipisahkan antara perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, serta pengawasan, di mana setiap tahapan memiliki sifat interdependensi tinggi yang menjadi pondasi keberlangsungan operasional suatu organisasi.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Penguatan teoritis ini dipertegas oleh Hasibuan (2016: Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara) yang mendefinisikan manajemen sebagai sebuah kombinasi sains dan seni yang berfokus pada penyelarasan pemanfaatan modal manusia serta sumber daya non-manusia secara terukur demi merengkuh sasaran institusional secara paripurna. Dalam konteks kelembagaan BUMDes, postulat ilmiah ini menegaskan bahwa keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh kecakapan pengelola dalam mengoordinasikan modal kapital, baik yang bersumber dari penyertaan kekayaan asli desa yang dipisahkan, dana stimulan pemerintah daerah, tabungan kolektif warga, maupun sistem bagi hasil bersama pihak ketiga, guna dikonversikan menjadi unit usaha yang produktif sekaligus bernilai guna tinggi bagi masyarakat desa.

Dalam ranah organisasi sektor publik, tata laksana pengelolaan unit usaha desa tidak boleh dilepaskan dari paradigma tata kelola yang baik (governance), yang berfungsi sebagai regulasi internal dan instrumen pengendalian untuk menjamin seluruh gerak operasional lembaga tetap berada pada khittah misinya. Menurut pemikiran Sedarmayanti (2017), tata kelola yang ideal harus bersandar pada nilai keterbukaan arus informasi, tanggung jawab moral maupun administratif yang sahih, serta pelibatan elemen masyarakat sipil secara substantif dan bermakna. Mengacu pada kerangka dasar tersebut, Ibrahim (2018) merumuskan enam dimensi utama tata kelola yang wajib diimplementasikan dalam struktur operasional BUMDes, yang diawali oleh prinsip kooperatif yang menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi internal antarpengelola demi menjaga resiliensi bisnis. Dimensi selanjutnya adalah partisipatif yang menuntut kontribusi sukarela dari segenap warga, diikuti oleh emansipatif yang menjamin kesetaraan hak tanpa membedakan latar belakang sosial, serta transparan guna memastikan keterbukaan akses informasi publik. Selain itu, aspek akuntabel mewajibkan pertanggungjawaban administratif kepada otoritas berwenang, dan dimensi sustainabel memastikan orientasi usaha diarahkan untuk pelestarian jangka panjang bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, konstruksi teoritis mengenai kepuasan pada dasarnya merupakan cerminan dari respon afektif maupun evaluatif seorang individu ketika membandingkan antara performa ril dari produk atau layanan yang mereka rasakan dengan ekspektasi awal sebelum konsumsi dilakukan. Berdasarkan postulat dari Philip Kotler dan Keller (2021: Marketing Management, 16th Edition, New Jersey: Pearson Education), kepuasan didefinisikan sebagai ekspresi emosional berupa perasaan senang atau kekecewaan mendalam yang mengemuka sebagai dampak langsung dari penilaian komparatif antara kinerja aktual layanan dengan standar harapan pengguna. Ketika kinerja operasional melampaui atau minimal setara dengan ekspektasi, maka kepuasan kolektif akan mewujud secara positif, sedangkan deviasi negatif di mana performa berada di bawah ekspektasi akan memicu sentimen ketidakpuasan. Menambahkan perspektif komersial tersebut, Fandy Tjiptono (2019: Strategi Pemasaran) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan sejatinya merupakan sebuah bentuk evaluasi kognitif pasca-pembelian yang merefleksikan seberapa tinggi pemenuhan kebutuhan dan harapan individu terhadap suatu produk atau jasa, menjadikannya parameter objektif yang sangat valid guna mengukur kualitas layanan publik secara komprehensif.

Korelasi fungsional antara tata kelola kelembagaan usaha desa dengan tingkat kepuasan konstituen publik memperlihatkan hubungan kausalitas linear yang saling bertautan erat. Merujuk pada indikator pengukuran yang diadopsi dari model Kotler dan Keller (2021), kepuasan masyarakat terhadap eksistensi BUMDes dipecah ke dalam tiga dimensi operasional yang fundamental, yakni kepuasan terhadap kualitas produk intrinsik seperti mutu komoditas telur ayam petelur dan struktur harganya, kepuasan terhadap dimensi pelayanan yang mengukur aspek keramahan, kecepatan, serta aksesibilitas pengelola, hingga kepuasan secara keseluruhan yang mencerminkan loyalitas jangka

panjang publik. Ketika implementasi tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel dijalankan secara konsisten oleh pengelola BUMDes, maka secara linier hal tersebut akan mengeskalasi persepsi positif dan melahirkan kepuasan publik yang tinggi terhadap kehadiran organisasi pelayanan ini. Sebaliknya, pengelolaan yang diwarnai oleh deviasi manajerial, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya inovasi bisnis akan mereduksi kualitas pelayanan, yang pada akhirnya menekan angka kepuasan warga dan merugikan eksistensi kelembagaan desa secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Guna mengupas fenomena di lokasi tersebut, digunakan pendekatan kuantitatif empiris yang berakar pada filsafat positivisme. Sebagaimana dijabarkan oleh Sugiyono (2019:12), paradigma tradisional atau positivistik ini memandang realitas sebagai sesuatu yang konkret, terukur, objektif, dan mengikuti hukum sebab-akibat. Lebih lanjut, Creswell (dalam Amruddin 2022:8) menegaskan bahwa studi kuantitatif difokuskan untuk menguji teori-teori tertentu secara ilmiah melalui pengukuran variabel penelitian menggunakan instrumen formal, sehingga data numerik hasil pengukuran tersebut dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik yang baku.

Jenis desain yang diterapkan dalam investigasi ilmiah ini adalah kuantitatif dengan pola asosiatif kausal. Menurut penjelasan Sujarweni (2022:45), studi asosiatif dirancang untuk membongkar derajat hubungan serta kontribusi nyata antara dua variabel atau lebih, yang nantinya berfungsi menjelaskan, memprediksi, sekaligus mengendalikan suatu gejala sosial. Operasionalisasinya di lapangan mengandalkan metode survei, di mana peneliti menyebarkan angket atau kuesioner terstruktur kepada kelompok masyarakat yang terpilih sebagai responden. Seluruh data angka yang terhimpun dari lapangan selanjutnya diolah menggunakan teknik analisis statistik, khususnya uji regresi linear, untuk memvalidasi ada tidaknya pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Lingkup wilayah generalisasi dalam riset ini mencakup seluruh elemen masyarakat yang menetap di Desa Padang Basar Hilir. Merujuk pada pemikiran Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2022:130), populasi diartikan sebagai kumpulan total elemen yang menjadi objek inferensi atau penarikan kesimpulan. Data riil mencatat populasi di desa tersebut berjumlah 530 jiwa, yang terbagi atas 252 laki-laki dan 278 perempuan. Mengingat besarnya jumlah populasi serta keterbatasan waktu dan biaya, keterwakilan data diambil melalui teknik *probability sampling* jenis *simple random sampling* (Sugiyono 2022:131). Melalui penghitungan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10%, maka diperoleh jumlah sampel representatif minimal sebanyak 84 responden.

Fokus pengukuran dalam penelitian ini melibatkan dua variabel utama, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Variabel independen (X) diposisikan sebagai variabel yang memicu perubahan dan dalam konteks ini mewakili tata kelola atau Pengelolaan BUMDes. Kerangka operasional untuk mengukur pengelolaan ini mengadopsi teori manajemen kontemporer dari Ibrahim (2018:34), yang membaginya ke dalam enam dimensi esensial. Keenam pilar tersebut meliputi aspek kooperatif yang menilai kemitraan tim, partisipatif untuk mengukur keterlibatan aktif warga, emansipatif guna melihat kesetaraan hak, transparan terkait keterbukaan akses informasi operasional, akuntabel dalam konteks pertanggungjawaban publik, serta aspek keberlanjutan (*sustainable*) yang menakar rencana pengembangan unit usaha jangka panjang demi profit konsisten. Sementara itu, variabel terikat (Y) dalam kajian ini adalah tingkat kepuasan masyarakat selaku penerima dampak langsung dari kinerja organisasi desa tersebut. Landasan teoretis untuk membedah

tingkat kepuasan ini bersumber dari prinsip pemasaran mendasar yang dikembangkan oleh Kotler dan Keller (2022:78) dalam buku *Marketing Management*. Dimensi kepuasan dipecah menjadi tiga indikator utama, yaitu kepuasan terhadap aspek produk (mencakup kualitas barang, asas kemanfaatan, dan rasionalitas harga), kepuasan terhadap aspek pelayanan (menilai keramahan petugas, kecepatan respons, dan kemudahan birokrasi), serta kepuasan secara menyeluruh (*overall satisfaction*) yang memotret persepsi umum warga beserta dorongan psikologis mereka untuk memanfaatkan kembali atau merekomendasikan unit usaha BUMDes kepada pihak lain.

Keberhasilan pengumpulan data kuantitatif sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan sebagai alat ukur fenomena sosial ini. Peneliti merancang instrumen berupa kuesioner tertutup, sebuah daftar pernyataan terstruktur yang opsi jawabannya telah disediakan secara baku sehingga responden hanya perlu memilih pilihan yang paling sesuai, sejalan dengan pandangan Sugiyono (dalam Kurniawan 2021:1). Penyusunan butir pernyataan ini diturunkan secara runtut dari definisi operasional ke indikator spesifik masing-masing variabel. Untuk melengkapi dan memperkuat orisinalitas data kuesioner, peneliti juga mengombinasikannya dengan teknik observasi lapangan secara sistematis serta metode dokumentasi untuk menghimpun arsip, data demografi, dan catatan administratif resmi yang relevan di Desa Padang Basar Hilir (Sugiyono 2020:199).

Data mentah yang bersumber dari persepsi subjektif responden ditransformasikan ke dalam bentuk angka nominal memanfaatkan Skala Likert dengan rentang skor 1 sampai 5. Berdasarkan formulasi Sugiyono (2018:213), alternatif jawaban dirinci menjadi Sangat Puas (skor 5), Puas (skor 4), Kurang Puas (skor 3), Tidak Puas (skor 2), dan Sangat Tidak Puas (skor 1). Guna memudahkan kategorisasi data setelah rata-rata skor dihitung, peneliti menetapkan rentang skala interval sebesar 0,80 yang diperoleh dari selisih skor tertinggi dan terendah dibagi jumlah kelas. Pembagian klasifikasi interpretasi skor akhir bergerak dari rentang sangat rendah (1,00–1,80), rendah (1,81–2,60), sedang (2,61–3,40), tinggi (3,41–4,20), hingga kategori sangat tinggi pada skor 4,21–5,00.

Sebelum instrumen disebarkan secara masif, kualitas data harus dijamin terlebih dahulu melalui pengujian validitas dan reliabilitas secara digital menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Uji validitas dioperasikan lewat teknik korelasi *Pearson Product Moment*, dengan parameter keputusan bahwa suatu butir pernyataan valid apabila nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ pada taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, tingkat konsistensi internal kuesioner diukur melalui uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Apabila nilai koefisien *Cronbach's Alpha* yang dihasilkan melampaui ambang batas standar sebesar 0,60, maka instrumen tersebut dinyatakan andal dan konsisten untuk digunakan berulang kali (Sugiyono 2018:274). Sebagai tambahan, kekuatan hubungan antarvariabel dianalisis lewat uji korelasi Pearson guna mengonfirmasi signifikansi hubungannya berdasarkan rentang koefisien korelasi.

Memenuhi kaidah metodologis setelah data terkumpul, serangkaian uji asumsi klasik diterapkan sebagai prasyarat wajib sebelum melangkah ke pemodelan regresi terikat (Sugiyono 2017:147). Pengujian awal adalah uji normalitas menggunakan prosedur statistik *Kolmogorov-Smirnov* guna memastikan residual model berdistribusi normal dengan indikator nilai signifikansi harus lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, dijalankan uji heteroskedastisitas menggunakan analisis visual grafik *scatterplot* di mana sebaran titik-titik yang acak dan tidak membentuk pola geometris tertentu mengindikasikan terpenuhinya syarat homoskedastisitas. Terakhir, dilakukan uji linearitas dengan mengamati parameter *Deviation from Linearity* pada tabel ANOVA untuk memastikan hubungan antara tata kelola BUMDes dan kepuasan warga memang berpola linear (Sig. > 0,05).

Pada tahap akhir analisis data, pengujian hipotesis dilakukan melalui model Regresi Linear Sederhana dengan formulasi matematis $Y = a + bX$ di mana Y mewakili kepuasan masyarakat dan X mewakili pengelolaan BUMDes. Pengujian signifikansi pengaruh secara parsial dilakukan melalui Uji t dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} pada *alpha* 5% untuk menentukan apakah hipotesis

nihil (H_0) ditolak atau diterima. Untuk melengkapinya, Uji Koefisien Determinasi (R^2) dievaluasi melalui kolom *R Square* pada tabel *Model Summary* SPSS guna mengukur persentase seberapa besar kontribusi atau daya eksplanasi yang diberikan oleh variabel independen dalam memengaruhi fluktuasi variabel dependen secara nyata.

PEMBAHASAN

Rangkaian pembuktian empiris dalam penelitian ini diawali dengan pengujian instrumen serta pemenuhan asumsi klasik, yang secara keseluruhan menegaskan bahwa data yang dihimpun memiliki kelayakan penuh untuk mengestimasi dampak tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kepuasan warga setempat. Melalui pengujian validitas, diperoleh kepastian bahwa seluruh butir instrumen pada variabel independen tata kelola BUMDes (X) maupun variabel dependen kepuasan masyarakat (Y) menunjukkan nilai r hitung yang melampaui ambang batas r tabel. Fakta ini mengindikasikan bahwa setiap kalimat pernyataan mampu mengejawantahkan dan mengukur konstruk psikometris yang diteliti secara akurat. Linearitas pengumpulan data tersebut diperkuat oleh uji reliabilitas yang menghasilkan koefisien konsistensi internal yang tinggi, mengukuhkan bahwa instrumen ini stabil dan bebas dari kesalahan pengukuran yang berarti sehingga data yang diproduksi dapat diandalkan secara ilmiah. Beranjak pada pengujian asumsi klasik, uji normalitas lewat pendekatan Kolmogorov-Smirnov menelurkan angka signifikansi sebesar 0,200 (>0,05), sehingga ditarik simpulan sahih bahwa persebaran data mengikuti kurva normal secara ideal. Selanjutnya, observasi visual terhadap grafik scatterplot dalam uji heteroskedastisitas memperlihatkan titik-titik data yang memencar secara acak tanpa membentuk konfigurasi geometris tertentu, yang berarti model regresi bersih dari gangguan varians faktor pengganggu. Dominasi linearitas hubungan antarkonstruk juga terbukti lewat perolehan nilai signifikansi Linearity senilai 0,000 (<0,05) serta nilai Deviation from Linearity yang menyentuh angka 0,204 (>0,05), menegaskan bahwa korelasi antarlaten berbentuk garis lurus. Terpenuhinya seluruh prasyarat metodologis ini memberikan legitimasi penuh untuk menerapkan analisis regresi linear sederhana dalam menguji hipotesis kausalitas yang diajukan.

Melangkah pada analisis inferensial, dinamika asosiatif antarvariabel ditunjukkan oleh perolehan koefisien korelasi (R) senilai 0,714, sebuah angka yang merepresentasikan derajat hubungan yang sangat kuat sekaligus searah. Pola linier positif ini memberikan makna fungsional bahwa potret manajerial BUMDes yang semakin profesional akan berjalan beriringan dengan melonjaknya pemenuhan ekspektasi dan kepuasan kolektif di kalangan masyarakat desa. Daya prediktif model ini tercermin secara eksplisit melalui koefisien determinasi (R Square) yang menyentuh angka 0,509, mengindikasikan bahwa variabilitas kepuasan warga mampu dijelaskan oleh kapasitas tata kelola institusi desa sebesar 50,9%. Sementara itu, porsi sisa sebesar 49,1% bersumber dari kontribusi variabel eksogen lain yang berada di luar lokus amatan penelitian ini, sebuah proporsi yang wajar dalam lanskap sosial pedesaan. Lebih lanjut, formalisasi matematis dari pengaruh ini tertuang dalam struktur persamaan regresi linear sederhana Y = 12,274 + 0,404X, dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat yakni sebesar 0,000 (<0,05). Formulasi tersebut membuktikan bahwa setiap intervensi positif berupa penambahan satu satuan kualitas manajemen BUMDes akan memicu peningkatan kepuasan publik sebesar 0,404 satuan secara konstan. Keyakinan statistik ini diperkuat secara empiris oleh hasil uji t, di mana besaran t hitung yang didapatkan mencapai angka 9,226, jauh melampaui nilai kritis t tabel yang hanya sebesar 1,664. Dengan demikian, keputusan menolak

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

hipotesis nol diambil, memberikan bukti konkret bahwa penguatan sistem kelola lembaga ekonomi desa berbanding lurus dengan tingginya apresiasi positif serta kepuasan riil masyarakat

Apabila dievaluasi secara kualitatif berlandaskan konsepsi teoretis mengenai dimensi tata kelola organisasi publik menurut Ibrahim (2018: 74), tata pamong BUMDes di wilayah Desa Padang Basar Hilir secara umum telah menunjukkan performa yang cukup akomodatif, meski masih menyisakan beberapa celah evaluatif. Pada pilar kooperatif, segenap jajaran pengurus operasional terbukti telah mampu membangun sinergi internal demi menjalankan roda perekonomian lembaga. Kendati demikian, temuan lapangan dari hasil observasi mendalam dan wawancara terstruktur mengindikasikan adanya kendala struktural berupa lemahnya jalinan koordinasi berkala antar-individu pengelola, sehingga pola eksekusi program kerja terkadang mengalami tumpang tindih dan kurang efektif. Realitas ini mengisyaratkan bahwa kebersamaan yang telah terbentuk secara formal harus diimbangi oleh mekanisme komunikasi yang adaptif agar akselerasi tujuan strategis organisasi dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi internal. Sementara itu, pada pilar partisipatif, ruang keterlibatan bagi masyarakat lokal sejatinya telah diwadahi melalui berbagai agenda seremonial dan operasional BUMDes. Namun, kontribusi masyarakat dalam menelurkan gagasan visioner, kritik konstruktif, serta usulan inovasi komersial dinilai masih sangat minim dan belum dimobilisasi secara terstruktur. Fenomena ini menunjukkan bahwa pelibatan publik baru sebatas kehadiran fisik, belum menyentuh ranah pemikiran kolektif yang esensial bagi pembaruan bisnis. Oleh karena itu, jajaran direksi dituntut untuk merumuskan saluran komunikasi publik yang lebih inklusif demi menyerap aspirasi segar sebagai modal inovasi usaha.

Tinjauan kritis berikutnya diarahkan pada dimensi transparansi, di mana potret keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh manajemen BUMDes dinilai telah memenuhi standar dasar melalui penyampaian laporan kondisi riil usaha dan kendala eksternal yang sedang dihadapi. Namun, tantangan mendasar terletak pada efektivitas diseminasi informasi tersebut, yang dirasa masih kurang komunikatif, rumit, serta belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat desa secara merata. Merujuk pada prinsip tata kelola yang dikemukakan oleh Ibrahim (2018: 112), kejelasan publikasi dan kemudahan aksesibilitas dokumen finansial maupun operasional merupakan fondasi utama untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kepercayaan (trust) yang kokoh dari masyarakat terhadap eksistensi lembaga ekonomi desa tersebut. Di sisi lain, performa tata kelola pada pilar emansipatif, akuntabilitas, serta keberlanjutan (sustainability) terpantau berada pada koridor yang positif. Pengelola menunjukkan komitmen moral untuk memberikan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi kepada segenap warga, menjalankan tanggung jawab manajerial sesuai dengan regulasi baku, serta mengupayakan keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Kendati demikian, hasil verifikasi faktual memperlihatkan adanya kerentanan usaha karena BUMDes ini masih sangat bergantung pada satu unit usaha tunggal, yaitu budidaya ternak ayam petelur. Ketergantungan yang tinggi pada komoditas tunggal ini sangat berisiko terhadap fluktuasi pasar, sehingga upaya diversifikasi unit usaha menjadi agenda mendesak demi memperkuat daya tahan ekonomi lembaga sekaligus memperluas spektrum kemanfaatan finansial bagi masyarakat desa.

Jika direfleksikan menggunakan pisau analisis teori kepuasan konsumen yang dirumuskan oleh Kotler dan Keller (2022), akumulasi respons empiris memperlihatkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap performa BUMDes berada pada kategori yang sangat memuaskan. Indikator pemenuhan kepuasan tersebut terejawantah secara komprehensif melalui persepsi positif warga terhadap mutu produk yang dihasilkan, rasionalitas penetapan harga yang terjangkau, kemanfaatan fungsional yang dirasakan langsung, hingga aspek keramahtanganan dalam pelayanan operasional

harian. Loyalitas publik ini bahkan terkonfirmasi lewat tingginya minat masyarakat untuk melakukan pembelian ulang atas produk BUMDes, disertai dengan kerelaan sosial untuk merekomendasikan unit usaha tersebut kepada kolega dan komunitas eksternal secara sukarela. Pola perilaku positif ini mengindikasikan bahwa kehadiran institusi ekonomi desa tidak hanya sukses bertindak sebagai stimulus ekonomi mikro lokal, tetapi juga berhasil menyentuh aspek psikologis masyarakat melalui pemenuhan standar harapan mereka terhadap kualitas pelayanan publik. Secara holistik, jalinan temuan kuantitatif dan kualitatif dalam studi ini menegaskan bahwa tata kelola BUMDes yang prima yang diintegrasikan lewat penguatan kerja sama, peningkatan inklusivitas partisipasi publik, transparansi arus informasi, akuntabilitas manajerial, dan orientasi bisnis berkelanjutan memiliki kontribusi absolut dalam mengatrol indeks kepuasan warga. Guna mengoptimalkan capaian tersebut secara berkelanjutan di Desa Padang Basar Hilir, restrukturisasi internal yang berfokus pada penguatan koordinasi antar-pengurus, perluasan ruang gagasan warga, efisiensi saluran informasi publik, dan keberanian melakukan diversifikasi portofolio bisnis menjadi langkah strategis yang tidak dapat ditawar lagi.

SIMPULAN

Sintesis akhir dari rangkaian investigasi empiris mengenai dinamika pengaruh tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap tingkat kepuasan publik di wilayah Desa Padang Basar Hilir, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, menuntun pada konklusi krusial bahwa intervensi manajerial institusi ekonomi pedesaan tersebut memegang peranan yang sangat determinan. Berlandaskan hasil komputasi data statistik menggunakan peranti software SPSS terhadap 84 responden lokal (df = N - 2 = 82), diperoleh pembuktian konkret bahwa variabel independen tata kelola BUMDes (X) memberikan stimulasi yang positif serta sangat signifikan dalam memicu lonjakan variabel dependen kepuasan masyarakat (Y). Legitimasi hubungan kausalitas ini tercermin secara benderang dari perolehan angka signifikansi uji regresi yang menyentuh nilai 0,000 (<0,05), sebuah parameter empiris yang secara otomatis menggugurkan hipotesis nol (H_0) sekaligus menerima hipotesis alternatif (H_a) secara mutlak. Penguatan matematis atas argumentasi tersebut juga dipertegas oleh raihan nilai t hitung yang meroket hingga angka 9,226, jauh melampaui batas ambang kritis t tabel yang hanya berada pada posisi 1,664, sehingga mengukuhkan adanya impak riil yang masif dari sistem pengorganisasian BUMDes terhadap pemenuhan ekspektasi warga. Dalam lanskap asosiatif, keeratan hubungan antarkonstruk ini ditunjukkan oleh koefisien korelasi (R) senilai 0,714 yang mengindikasikan jalinan searah dalam kategori kuat, bermakna bahwa setiap akselerasi mutu tata pamong lembaga ekonomi akan senantiasa diikuti dengan eskalasi indeks kepuasan kolektif yang dirasakan langsung oleh masyarakat daerah setempat. Kedalaman pengaruh ini tercatat secara presisi melalui koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,509, mengindikasikan eksistensi tata kelola BUMDes memiliki kontribusi kontributif sebesar 50,9% terhadap variabilitas kepuasan publik, sementara porsi sisa sebesar 49,1% dikendalikan oleh aneka determinan eksogen lain di luar fokus pemodelan riset ini. Pola hubungan linier antarvariabel tersebut diformalisasikan ke dalam rumus fungsi regresi linear

sederhana, yaitu Y = 12,274 + 0,404X, sebuah proyeksi matematis yang menegaskan bahwa setiap kali terjadi penambahan kualitas manajemen operasional sebesar satu unit konstan, maka tingkat kepuasan masyarakat akan terkatrol naik sebesar 0,404 satuan secara ajek. Jika ditinjau dari kacamata teori kepuasan konsumen oleh Kotler dan Keller (2022: 142), terpenuhinya ekspektasi publik ini bersumber dari kapabilitas organisasi dalam mentransformasikan operasional menjadi nilai manfaat nyata, yang dalam konteks BUMDes di lokasi ini ditopang oleh keberhasilan implementasi enam pilar tata kelola publik menurut Ibrahim (2018: 85), yang meliputi dimensi kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (*sustainable*) yang secara umum dinilai warga sudah berjalan dalam koridor yang cukup baik. Kendati konklusi kuantitatif menyajikan tren performa yang impresif, potret kualitatif dari hasil observasi lapangan mendalam dan wawancara terstruktur mengekspos sejumlah anomali operasional yang masih menjadi batu sandungan, seperti minimnyaa program pelatihan peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi jajaran direksi, keterbatasan fasilitas sarana prasarana penunjang unit bisnis, serta belum optimalnya ruang bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam menyumbang pemikiran kritis dan usulan inovasi bisnis. Serangkaian kendala struktural inilah yang pada akhirnya menyebabkan perolehan laba usaha komersial BUMDes belum mampu dihasilkan secara konsisten, sehingga menuntut adanya pembenahan tata kelola secara berkelanjutan demi menjamin kesinambungan manfaat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Padang Basar Hilir secara jangka panjang. Upaya strategis ini diharapkan mampu merestrukturisasi sistem birokrasi internal organisasi demi melahirkan kestabilan operasional perekonomian lembaga yang jauh lebih berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Abi Hamid, Mustofa Et al. (2021). *Pengelolaan Pendidikan.* Yayasan Kita Menulis.

Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2022). *Marketing Management (16th ed.).* Essex: Pearson Education Limited.

Ibrahim. (2018). *Manajemen Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Deepublish.

Tjiptono, F. (2019). *Strategi Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Yogyakarta: Andi Offset.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung*: Penerbit Alfabeta.